LAPORAN

PELATIHAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

“Evaluasi Implementasi SPBE Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah”

Disusun Oleh :

Nama : **Ade Rusy Fatkhul Azis**

NIP : **200101132025061010**

Jabatan : **Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama**

Satuan Kerja : **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah**

BALAI PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulisan laporan evaluasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan ini merupakan bagian penting dalam Pelatihan Tata Kelola dan Manajemen SPBE yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Hukum Jawa Tengah.

Kegiatan evaluasi yang ada dalam laporan ini diharapkan dapat mencerminkan upaya nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai dasar profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK).

Pembuatan laporan evaluasi implementasi SPBE ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
2. Seluruh Pengajar dan Penyelenggara yang telah memfasilitasi kegiatan belajar mengajar;
3. Seluruh staf pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah atas bantuan dan dukungannya;
4. Semua pihak lainnya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini.

Penulis sadar bahwa laporan evaluasi ini masih terdapat kekurangan. Penulis berharap adanya masukan yang membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan evaluasi implementasi SPBE ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 25 Agustus 2026



Ade Rusy Fatkhul Azis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 2
C. Ruang Lingkup 2
D. Dasar Hukum 2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 3
A. Gambaran Umum SPBE di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah 3
B. Aplikasi SPBE yang Digunakan 4
1. Halaman Informasi Kepegawaian Jawa Tengah (HAI PENENGAH) 4
2. Sistem Ambil Nomor Surat (TEMANS) 4
BAB III EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE 5
A. Halaman Informasi Kepegawaian Jawa Tengah (HAI PENENGAH) 5
1. Identifikasi Kondisi Saat Ini 5
2. Identifikasi Kondisi yang Diharapkan 6
3. Gap Analysis 6
B. Sistem Ambil Nomor Surat (TEMANS) 7
1. Identifikasi Kondisi Saat Ini 7
2. Identifikasi Kondisi yang Diharapkan 8
3. Gap Analysis 9
BAB IV KESIMPULAN 10
BAB V REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT 11
A. Rekomendasi Per Sistem 11
B. Rencana Tindak Lanjut 12
BAB VI PENUTUP 13
LAMPIRAN 14

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era disrupsi digital menjadikan teknologi informatika dan telekomunikasi sebagai hal yang sangat signifikan tidak hanya dalam kehidupan masyarakat tetapi juga dalam hal perkembangan ekonomi negara.

Pemerintahan digital merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan ekosistem digital. Sudah saatnya seluruh elemen pemerintahan baik di pusat maupun daerah saling berkolaborasi mewujudkan sistem pemerintahan yang terpadu secara nasional. Tujuannya tidak lain ialah mewujudkan layanan pemerintahan yang dapat dengan mudah diakses serta digunakan oleh masyarakat.

Di era perkembangan teknologi ini, transformasi digital menjadi sebuah proses yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi dalam mengoptimalkan proses bisnisnya. Organisasi membangun teknologi digital dan inovatif untuk membuat perubahan budaya dan operasional yang beradaptasi lebih baik untuk mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan berkualitas. Lebih dari itu, digitalisasi juga telah menjadi suatu hal yang krusial. Jika sebelumnya digitalisasi merupakan nilai jual bagi organisasi, kini digitalisasi menjadi suatu keharusan yang wajib untuk dilaksanakan.

Transformasi tata kelola pemerintahan menuju era digital yang disebut sebagai Governance 4.0 diwujudkan melalui perancangan dan pengelolaan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tepat dengan menekankan prinsip data driven government.

Sebagai aktualisasi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dalam rangka memberikan ruang bagi warga negara untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi, pemerintah menetapkan kebijakan tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara nasional melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada para Pengguna SPBE. Salah satu contoh nyata dari SPBE pada instansi pemerintah adalah penggunaan aplikasi-aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi instansi dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari.

Kementerian Hukum sendiri telah menetapkan kebijakan terkait tata kelola dan manajemen SPBE melalui Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Hukum.

Setelah dilakukan inventaris ada sebanyak 5 (lima) aplikasi yang dibangun dan dikembangkan secara mandiri oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Sebagai seorang Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, penulis menyoroti secara khusus dua aplikasi utama yang memiliki keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya manusia. Kedua aplikasi tersebut adalah (HAI PENENGAH) yang dibangun dan dikembangkan secara mandiri oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dan (TEMANS) Sistem Ambil Nomor Surat. Kedua sistem tersebut hadir sebagai aplikasi internal yang mendukung percepatan penyampaian informasi, pelaporan pencapaian kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang kepegawaian. Kedua aplikasi ini menjadi instrumen krusial bagi penulis dalam menjalankan peran sebagai analis SDM.

Untuk mengetahui apakah teknologi informasi tersebut telah dimanfaatkan secara optimal dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi sumber daya manusia, dan pemberian layanan kepada publik, dilakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

B. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan evaluasi implementasi SPBE dilakukan untuk mengetahui apakah teknologi informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah digunakan secara optimal oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi sumber daya manusia, dan pemberian layanan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pelaksanaan evaluasi implementasi SPBE ini difokuskan pada dua aplikasi utama yang berkaitan dengan bidang sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, yaitu: HAI PENENGAH dan TEMANS.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Menteri Hukum No. 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum;
3. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Taun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Gambaran Umum SPBE di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan nasional tentang SPBE, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah mengimplementasikan berbagai aplikasi dan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Aplikasi-aplikasi tersebut terdiri dari aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh unit utama Kementerian Hukum serta aplikasi yang dibangun secara mandiri oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

Pemanfaatan aplikasi SPBE di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mencakup berbagai aspek, antara lain manajemen sumber daya manusia melalui aplikasi HAI PENENGAH, manajemen surat dan dokumen melalui aplikasi TEMANS, pelayanan publik melalui berbagai aplikasi pelayanan yang terintegrasi, pengelolaan kinerja melalui sistem pelaporan dan monitoring kinerja, serta pengelolaan keuangan dan aset melalui aplikasi yang terintegrasi dengan sistem keuangan negara.

Sebagai seorang Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, penulis memfokuskan evaluasi pada dua aplikasi yang memiliki keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya manusia dan tata kelola administrasi perkantoran. Kedua aplikasi tersebut adalah Halaman Informasi Kepegawaian Jawa Tengah (HAI PENENGAH) yang dibangun dan dikembangkan secara mandiri oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, serta Sistem Ambil Nomor Surat (TEMANS) yang juga merupakan inovasi digital dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. HAI PENENGAH berperan penting dalam mendukung percepatan penyampaian informasi kepegawaian dan pelaporan pencapaian kinerja pegawai, sedangkan TEMANS berfungsi untuk mendukung pengelolaan penomoran surat agar lebih tertib, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Kedua aplikasi ini menjadi instrumen penting dalam menunjang kelancaran administrasi kepegawaian dan tata usaha di lingkungan kantor wilayah.

B. Aplikasi SPBE yang Digunakan

Berdasarkan hasil inventarisasi ada 5 (lima) aplikasi yang dibangun mandiri oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Dari sekian banyak aplikasi tersebut, penulis menyoroti secara khusus dua aplikasi yang relevan dengan bidang tugas penulis, yaitu HAI PENENGAH dan TEMANS. Adapun uraian mengenai kedua aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Halaman Informasi Kepegawaian Jawa Tengah (HAI PENENGAH)

HAI PENENGAH merupakan aplikasi internal yang lahir guna merespons kebutuhan percepatan penyampaian informasi, pelaporan, dan peningkatan kualitas pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah khususnya pada pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi Unit Pelaksana Teknis dan pegawai Kantor Wilayah untuk menyampaikan pelaporan pencapaian kinerja secara cepat dan terstruktur. Sebagai seorang analis SDM, penulis menggunakan aplikasi ini untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pegawai di seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, sehingga data kinerja yang terkumpul dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Aplikasi ini dapat diakses dan menyajikan berbagai fitur yang mendukung pengelolaan informasi kepegawaian secara efektif dan efisien.

2. Sistem Ambil Nomor Surat (TEMANS)

TEMANS merupakan inovasi digital yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan penomoran surat agar lebih tertib, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Aplikasi ini lahir dari kebutuhan untuk mengatasi permasalahan penomoran surat yang selama ini masih dilakukan secara manual dan kurang terstruktur. Dengan adanya TEMANS, setiap surat yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah memperoleh nomor surat yang teratur dan terdokumentasi secara digital, sehingga memudahkan proses pencarian dan pelacakan surat di kemudian hari. Meskipun aplikasi ini tidak secara langsung terkait dengan bidang sumber daya manusia, penggunaannya sangat penting dalam menunjang tertib administrasi perkantoran yang menjadi bagian dari tugas Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga. Sebagai analis SDM yang juga terlibat dalam administrasi perkantoran, penulis menggunakan TEMANS untuk memastikan setiap dokumen kepegawaian yang diterbitkan memiliki penomoran yang teratur dan terdokumentasi dengan baik.

BAB III
EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE

Evaluasi implementasi SPBE di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dilakukan secara mendalam terhadap dua aplikasi utama yang menjadi fokus penulisan laporan ini, yaitu Halaman Informasi Kepegawaian Jawa Tengah (HAI PENENGAH) dan Sistem Ambil Nomor Surat (TEMANS). Kedua aplikasi tersebut merupakan inovasi digital yang dikembangkan secara mandiri oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia serta tata kelola administrasi perkantoran. Pendekatan evaluasi per sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara spesifik kelebihan, kekurangan, dan kesenjangan yang terjadi pada setiap aplikasi, sehingga rekomendasi perbaikan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sistem.

A. Halaman Informasi Kepegawaian Jawa Tengah (HAI PENENGAH)

1. Identifikasi Kondisi Saat Ini

HAI PENENGAH merupakan aplikasi internal yang dibangun menggunakan platform Google Sites dan dikembangkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah guna merespons kebutuhan percepatan penyampaian informasi, pelaporan, dan peningkatan kualitas pelayanan khususnya pada pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga. Sebagai seorang Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, penulis menggunakan aplikasi ini sebagai salah satu instrumen penting dalam memantau dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkungan Kantor Wilayah. Saat ini, aplikasi tersebut telah dapat diakses melalui jaringan internal Kanwil maupun dari luar jaringan atau eksternal, sehingga pegawai Unit Pelaksana Teknis yang berada di luar kantor pusat tetap dapat mengakses dan melaporkan kinerjanya melalui aplikasi ini dengan mudah.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi tampilan HAI PENENGAH, aplikasi ini memiliki struktur menu yang cukup terorganisir dengan baik. Tingkat pemanfaatan HAI PENENGAH cukup memuaskan bagi pegawai Kantor Wilayah, di mana aplikasi ini dimanfaatkan untuk pelaporan pencapaian kinerja dan penyampaian informasi kepegawaian. Dari kualitas dan keandalan sistem, fitur pada HAI PENENGAH dinilai cukup baik, informasi kepegawaian ter-update secara berkala, tampilan sederhana namun fungsional, namun masih memerlukan pengembangan fitur untuk mendukung kebutuhan yang lebih kompleks dalam pengelolaan SDM. Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan platform Google Sites sebagai basis pembangunan aplikasi memiliki keterbatasan dalam hal

keamanan data dan kontrol akses yang lebih canggih, terutama untuk data kepegawaian yang bersifat sensitif.

2. Identifikasi Kondisi yang Diharapkan

Kondisi yang diharapkan dari HAI PENENGAH ke depan adalah pengembangan aplikasi dari platform Google Sites menuju aplikasi berbasis web yang lebih profesional dan memiliki fitur-fitur yang lebih lengkap, aman, dan terintegrasi. Prioritas utama yang harus segera diwujudkan adalah penerapan sistem login atau autentikasi pengguna yang memadai, sehingga hanya pegawai yang berwenang yang dapat mengakses dan menggunakan aplikasi ini. Sistem autentikasi yang diharapkan adalah integrasi dengan akun resmi pegawai atau single sign-on yang terhubung dengan sistem kepegawaian, sehingga setiap akses dan aktivitas dalam aplikasi dapat tercatat dan dipertanggungjawabkan. Dengan adanya sistem login, setiap pengunggahan data, perubahan data, atau aktivitas lainnya dapat dilacak dan diaudit, sehingga akuntabilitas dan integritas data kepegawaian dapat terjamin dengan baik.

Aplikasi berbasis web yang dikembangkan secara khusus akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengembangan fitur, keamanan data yang lebih baik dengan adanya autentikasi dan otorisasi pengguna.

3. Gap Analysis

Berdasarkan perbandingan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, terdapat beberapa kesenjangan atau gap pada HAI PENENGAH yang perlu mendapatkan perhatian. Kesenjangan tertinggi terjadi pada aspek keamanan data, khususnya tidak adanya sistem login atau autentikasi pengguna. Saat ini setiap orang yang memiliki tautan akses dapat mengakses aplikasi tanpa perlu login, sedangkan kondisi yang diharapkan adalah adanya sistem autentikasi yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian sehingga hanya pegawai yang berwenang yang dapat mengakses dan setiap aktivitas dapat tercatat dan diaudit. Hal ini menjadi prioritas utama karena menyangkut keamanan data kepegawaian yang bersifat sensitif dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Kesenjangan pada aspek platform pengembangan aplikasi, di mana saat ini masih menggunakan Google Sites yang memiliki keterbatasan dalam hal pengembangan fitur, keamanan, dan integrasi, sedangkan kondisi yang diharapkan adalah aplikasi berbasis web yang lebih profesional, juga menjadi prioritas utama. Aspek fitur yang masih sederhana dan perlu dikembangkan menjadi lebih komprehensif termasuk dalam kategori sedang dan menjadi prioritas kedua. Dari perspektif penulis, kesenjangan yang sangat terasa adalah belum adanya fitur yang lebih terstruktur. Hal ini menjadi prioritas kedua karena sangat mempengaruhi proses administrasi pegawai.

B. Sistem Ambil Nomor Surat (TEMANS)

1. Identifikasi Kondisi Saat Ini

TEMANS merupakan inovasi digital yang dikembangkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah untuk mendukung pengelolaan penomoran surat agar lebih tertib, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik. Aplikasi ini lahir dari kebutuhan untuk mengatasi permasalahan penomoran surat yang selama ini masih dilakukan secara manual dan kurang terstruktur di lingkungan Kantor Wilayah. Meskipun aplikasi ini tidak secara langsung terkait dengan bidang sumber daya manusia, penggunaannya sangat penting dalam menunjang tertib administrasi perkantoran yang menjadi bagian dari tugas Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga. Saat ini, aplikasi TEMANS telah dapat diakses melalui jaringan internal Kanwil maupun dari luar jaringan atau eksternal, sehingga pegawai yang berada di luar kantor pusat tetap dapat mengakses dan menggunakan aplikasi ini untuk keperluan penomoran surat.

Berdasarkan hasil observasi, TEMANS dibangun sebagai aplikasi berbasis web yang memiliki sistem login atau autentikasi pengguna, sehingga hanya pegawai yang memiliki akun dan hak akses yang dapat mengakses dan menggunakan aplikasi ini. Keberadaan sistem login ini merupakan keunggulan dibandingkan HAI PENENGAH, karena setiap aktivitas pengguna dalam aplikasi dapat tercatat dan dilacak, sehingga akuntabilitas penggunaan nomor surat dapat dipertanggungjawabkan.

Tingkat pemanfaatan TEMANS baru mencapai 70 persen pegawai Kantor Wilayah, karena masih banyak pegawai yang meminta pegawai lain untuk pengambilan nomor surat dan sosialisasi penggunaan TEMANS masih perlu ditingkatkan. Rendahnya tingkat pemanfaatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi kepada seluruh pegawai, kebiasaan pegawai yang sudah terbiasa menggunakan cara manual dalam pengambilan nomor surat. Dari segi kualitas dan keandalan sistem, fitur penomoran surat pada TEMANS sudah terstruktur dengan baik dan mampu menciptakan sistematisasi penomoran surat yang lebih tertib, nomor surat yang dihasilkan teratur dan terdokumentasi secara digital, sehingga memudahkan proses pencarian dan pelacakan surat di kemudian hari.

Salah satu kelemahan signifikan pada TEMANS adalah belum tersedianya panduan pengguna yang memadai. Dokumentasi dan panduan penggunaan TEMANS masih sangat terbatas, sehingga pengguna kesulitan mempelajari aplikasi secara mandiri. Tanpa adanya

panduan yang jelas dan lengkap, pegawai baru atau pegawai yang belum terbiasa dengan aplikasi ini akan mengalami kesulitan dalam memahami cara penggunaan, fitur-fitur yang tersedia, dan alur kerja yang harus diikuti. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pemanfaatan dan kepuasan pengguna, karena mereka merasa kesulitan dan tidak memiliki referensi yang dapat diandalkan ketika menghadapi kendala dalam penggunaan aplikasi. Panduan pengguna yang lengkap seharusnya mencakup petunjuk penggunaan langkah demi langkah, tutorial video, dan diagram alur, namun semua itu saat ini belum tersedia.

TEMANS memiliki tingkat kepuasan yang cukup baik, di mana keteraturan penomoran surat mendapat apresiasi dari pengguna, namun sosialisasi dan pelatihan masih sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan aplikasi. Sebagai pengguna di bidang SDM yang juga terlibat dalam administrasi perkantoran, penulis menggunakan TEMANS untuk memastikan setiap dokumen kepegawaian yang diterbitkan memiliki penomoran yang teratur dan terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan proses pencarian dan pelacakan surat di kemudian hari.

2. Identifikasi Kondisi yang Diharapkan

Kondisi yang diharapkan dari TEMANS ke depan adalah pengembangan aplikasi menjadi sistem yang mudah dipahami oleh pegawai. Tidak ada lagi pengambilan nomor melalui akun rekan pegwai. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan dua langkah fundamental yang harus segera dilakukan secara bersamaan, yaitu sosialisasi penggunaan TEMANS secara masif dan intensif kepada seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, serta penyediaan panduan pengguna yang komprehensif, mudah dipahami, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pengguna.

Sosialisasi melalui penyebaran informasi melalui surat edaran resmi, pemanfaatan media sosial internal, serta pengiriman informasi melalui grup-grup komunikasi pegawai. Sosialisasi harus mencakup penjelasan tentang manfaat dan keunggulan TEMANS dibandingkan cara manual dan tata cara penggunaan.

Panduan pengguna yang diharapkan harus disusun secara sistematis, profesional, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan pegawai, termasuk pegawai yang kurang terbiasa dengan teknologi. Panduan tersebut sebaiknya mencakup petunjuk penggunaan langkah demi langkah yang disusun secara rinci dan dilengkapi dengan gambar atau tangkapan layar untuk memudahkan pemahaman, tutorial video yang menunjukkan cara penggunaan aplikasi secara visual dan praktis, diagram alur yang menjelaskan proses bisnis penomoran surat dari awal hingga akhir. Panduan ini sebaiknya tersedia dalam berbagai format, baik

cetak yang dapat dibagikan secara fisik maupun digital yang dapat diakses langsung dari dalam aplikasi atau melalui tautan yang mudah dijangkau. Dengan adanya panduan yang lengkap, pegawai baru maupun pegawai yang belum terbiasa dapat mempelajari aplikasi secara mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain, sehingga tingkat pemanfaatan dan kepuasan pengguna dapat meningkat secara signifikan.

3. Gap Analysis

Pada TEMANS, kesenjangan tertinggi terjadi pada aspek tingkat pemanfaatan yang baru mencapai 70 persen sedangkan target 100 persen, sehingga ini menjadi prioritas utama. Kesenjangan pada aspek sosialisasi yang masih belum dilakukan secara masif dan menyeluruh kepada seluruh pegawai menjadi prioritas utama, karena tanpa sosialisasi yang memadai, pegawai tidak akan mengetahui keberadaan, manfaat, dan cara penggunaan TEMANS. Kesenjangan pada aspek belum tersedianya panduan pengguna yang komprehensif juga menjadi prioritas utama, karena panduan merupakan instrumen penting yang memungkinkan pegawai mempelajari aplikasi secara mandiri dan menjadi referensi ketika menghadapi kendala. Kedua kesenjangan ini saling berkaitan dan harus ditangani secara simultan untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan aplikasi.

BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SPBE di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yang telah dilakukan terhadap dua aplikasi utama yaitu Halaman Informasi Kepegawaian Jawa Tengah (HAI PENENGAH) dan Sistem Ambil Nomor Surat (TEMANS), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. implementasi SPBE di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah secara umum telah berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan tersedianya 5 (lima) aplikasi yang dikembangkan secara mandiri oleh Kantor Wilayah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Dari kelima aplikasi tersebut, HAI PENENGAH dan TEMANS merupakan dua aplikasi yang memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia serta tata kelola administrasi perkantoran.
2. berdasarkan analisis per sistem yang telah dilakukan, terdapat kesenjangan atau gap yang cukup signifikan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan pada kedua aplikasi. Pada HAI PENENGAH, kesenjangan terbesar terjadi pada aspek keamanan data karena tidak adanya sistem login atau autentikasi pengguna, serta penggunaan platform Google Sites yang memiliki keterbatasan dalam pengembangan fitur dan keamanan. Pada TEMANS, kesenjangan terbesar terjadi pada aspek tingkat pemanfaatan yang masih rendah, kurangnya sosialisasi, dan belum tersedianya panduan pengguna yang komprehensif.
3. Secara keseluruhan, gap yang terjadi dalam implementasi SPBE di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah pada kedua aplikasi dapat dikelompokkan ke dalam tiga tingkat prioritas penanganan. Prioritas utama meliputi penerapan sistem autentikasi pada HAI PENENGAH, sosialisasi masif dan penyediaan panduan pengguna pada TEMANS, serta pengembangan platform yang lebih profesional. Prioritas kedua meliputi pengembangan fitur-fitur yang lebih lengkap pada kedua aplikasi. Prioritas ketiga meliputi peningkatan dokumentasi sistem dan pelatihan pengguna secara berkelanjutan.

BAB V
REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kesenjangan yang telah dilakukan pada masing-masing sistem, berikut adalah rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk optimalisasi implementasi SPBE di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

A. Rekomendasi Per Sistem

1. Halaman Informasi Kepegawaian Jawa Tengah (HAI PENENGAH)

Rekomendasi yang diberikan untuk pengembangan HAI PENENGAH ke depan adalah melakukan pengembangan aplikasi dari platform Google Sites menuju aplikasi berbasis web yang lebih profesional dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, aman, dan terintegrasi. Prioritas utama yang harus segera diwujudkan adalah penerapan sistem login atau autentikasi pengguna yang memadai, sehingga hanya pegawai yang berwenang yang dapat mengakses dan menggunakan aplikasi ini. Sistem autentikasi yang direkomendasikan adalah integrasi dengan akun resmi pegawai atau single sign-on yang terhubung dengan sistem kepegawaian, sehingga setiap akses dan aktivitas dalam aplikasi dapat tercatat dan dipertanggungjawabkan. Dengan adanya sistem login, setiap pengunggahan data, perubahan data, atau aktivitas lainnya dapat dilacak dan diaudit, sehingga akuntabilitas dan integritas data kepegawaian dapat terjamin dengan baik. Selain itu, pengembangan fitur-fitur yang lebih terstruktur untuk mendukung proses administrasi pegawai juga sangat diperlukan.

2. Sistem Ambil Nomor Surat (TEMANS)

Rekomendasi untuk TEMANS adalah melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi secara masif dan intensif kepada seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, serta menyediakan panduan pengguna yang komprehensif, mudah dipahami, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pengguna. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penyebaran informasi melalui surat edaran resmi, pemanfaatan media sosial internal, serta pengiriman informasi melalui grup-grup komunikasi pegawai. Sosialisasi harus mencakup penjelasan tentang manfaat dan keunggulan TEMANS dibandingkan cara manual, tata cara penggunaan, dan kebijakan yang mengharuskan setiap pegawai menggunakan akunnya masing-masing dalam pengambilan nomor surat.

Panduan pengguna yang direkomendasikan harus disusun secara sistematis, profesional, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan pegawai, termasuk pegawai yang kurang terbiasa dengan teknologi. Panduan tersebut sebaiknya mencakup petunjuk penggunaan langkah demi langkah yang disusun secara rinci dan dilengkapi dengan gambar atau tangkapan layar untuk memudahkan pemahaman, tutorial video yang menunjukkan cara

penggunaan aplikasi secara visual dan praktis, serta diagram alur yang menjelaskan proses bisnis penomoran surat dari awal hingga akhir. Panduan ini sebaiknya tersedia dalam berbagai format, baik cetak yang dapat dibagikan secara fisik maupun digital yang dapat diakses langsung dari dalam aplikasi atau melalui tautan yang mudah dijangkau.

B. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi implementasi SPBE ini disusun dalam bentuk matriks rencana aksi sebagai berikut:

No	Kegiatan	Target	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator Keberhasilan
1	Penerapan sistem login/autentikasi pada HAI PENENGAH	Sistem autentikasi terintegrasi dengan akun pegawai	Bidang SDM & TI	Triwulan I 2027	Seluruh pegawai memiliki akun akses; setiap aktivitas tercatat dan dapat diaudit
2	Pengembangan platform HAI PENENGAH dari Google Sites ke aplikasi berbasis web	Aplikasi berbasis web yang profesional dan aman	Bidang SDM & TI	Triwulan II 2027	Aplikasi memiliki fitur lebih lengkap; keamanan data terjamin.
3	Sosialisasi TEMANS secara masif kepada seluruh pegawai	100% pegawai mengetahui TEMANS	Bidang SDM & TU	Triwulan IV 2026	Seluruh pegawai menerima informasi sosialisasi; pemahaman pegawai meningkat
4	Penyediaan panduan pengguna TEMANS yang komprehensif	Panduan tersedia dalam berbagai format	Bidang SDM & TU	Triwulan I 2027	Panduan mudah dipahami; pegawai dapat belajar mandiri

BAB VI
PENUTUP

Demikian laporan evaluasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Tata Kelola dan Manajemen SPBE di Balai Pelatihan Hukum Jawa Tengah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi implementasi SPBE di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, khususnya pada dua aplikasi utama yaitu HAI PENENGAH dan TEMANS, termasuk berbagai capaian yang telah diraih maupun tantangan dan kesenjangan yang masih perlu diatasi.

Evaluasi yang dilakukan secara mendalam terhadap kedua aplikasi menunjukkan bahwa implementasi SPBE telah memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja organisasi, namun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal keamanan data, sosialisasi, penyediaan panduan pengguna, dan pengembangan fitur. Melalui rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang telah disusun secara sistematis per sistem maupun secara umum, diharapkan implementasi SPBE di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dapat terus ditingkatkan menuju kondisi yang optimal.

Keberhasilan implementasi SPBE tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, terutama pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yang telah memberikan arahan dan kebijakan yang mendukung transformasi digital, seluruh pegawai yang telah beradaptasi dan memanfaatkan aplikasi SPBE dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, serta dukungan dari unit utama Kementerian Hukum dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem. Dengan kerja sama yang baik antara seluruh pihak, visi terwujudnya pemerintahan digital yang terintegrasi, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dapat tercapai.

Penulis menyadari bahwa laporan evaluasi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan. Semoga laporan evaluasi implementasi SPBE ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengembangan SPBE di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dan menjadi kontribusi bagi upaya transformasi digital pemerintahan di Indonesia secara lebih luas. Akhir kata, semoga upaya kita bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

LAMPIRAN

A. Hai Penengah



B. Temans

